

**ANALISIS PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MENGIKUTI PROGRAM  
KADER PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KECAMATAN BALIK  
BUKIT KABUPATEN LAMPUNG BARAT**

***ANALYSIS OF PUBLIC PARTICIPATION IN THE FOLLOWING PROGRAMS OF  
COMMUNITY EMPOWERMENT IN KECAMATAN BALIK BUKIT  
KABUPATEN LAMPUNG BARAT***

Oleh  
**Ani Heryani dan Novien Heryanto**

**ABSTRACT**

*The problem in this research is the lack of some public participation in the development process pekon, low absorption of funds pekon, less terakomodirnya the proposed activity-based community empowerment as well as less terakomodirnya proposal women's groups. Based on this then the goal in this research is to find out and analyze the public participation in the following programs of community empowerment in Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat and to knowing and analyzing the aspects of the barrier to the participation of the community in community empowerment cadre program in Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat. The design used in this study is a qualitative research design, the techniques used in collecting data, among others, by way of observation, interview and documentation. Data analysis technique used is an interactive model of analysis that includes the reduction of the data, the presentation of data and verification. Based on the results of the study can then note that: (1) community participation in the following programs of community empowerment in Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat, overall good enough already, it looks from some of the among other things: (a) public participation in program planning cadres community empowerment have been very good of the community is very active in various program planning development acceleration programs ranging from pekon, save program loan women mentoring program and the utilization of results, (b) community participation in the implementation of the programme of empowerment is very good thing seen from the existence of community participation in the form of energy, the existence of a grant from the society and its optimal program loan women, (c) community in utilizing the results of the program are made by excellent cadre of community empowerment in which the community exploit or use the facilities physical facilities ranging from empowerment and non physical. (2) restricting aspects of public participation in the following programs of community empowerment cadres, among others: still low awareness some community members, the bustle of the community and the low level of public education.*

**Keywords:** *Public Participation, Community Empowerment Cadre Program*

**ABSTRAK**

Masalah dalam penelitian ini adalah kurangnya sebagian partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan pekon, rendahnya penyerapan dana pekon, kurang terakomodirnya usulan kegiatan berbasis pemberdayaan masyarakat serta kurang terakomodirnya usulan kelompok perempuan. Berdasarkan hal tersebut maka tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis partisipasi masyarakat dalam mengikuti program kader pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat dan untuk

mengetahui dan menganalisis aspek-aspek penghambat partisipasi masyarakat dalam mengikuti program kader pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat. Desain yang digunakan dalam penelitian ini adalah desain penelitian kualitatif, Teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data antara lain dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis model interaktif yang meliputi reduksi data, penyajian data dan verifikasi. Berdasarkan hasil penelitian maka dapat diketahui bahwa: (1) Partisipasi masyarakat dalam mengikuti program kader pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat, secara keseluruhan sudah cukup baik, hal itu terlihat dari beberapa hal antara lain: (a) partisipasi masyarakat dalam perencanaan program kader pemberdayaan masyarakat sudah sangat baik masyarakat sangat aktif dalam berbagai perencanaan program mulai dari program percepatan pembangunan pekon, program Simpan Pinjam Perempuan (SPP) dan program pendampingan pemanfaatan hasil, (b) partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program pemberdayaan sangat baik hal terlihat dari adanya partisipasi masyarakat dalam bentuk tenaga, adanya hibah dari masyarakat dan optimalnya Program SPP, (c) masyarakat dalam memanfaatkan hasil dari program yang di buat oleh Kader Pemberdayaan Masyarakat sangat baik di mana masyarakat memanfaatkan atau menggunakan fasilitas pemberdayaan mulai dari fasilitas fisik maupun non fisik. (2) Aspek-aspek penghambat partisipasi masyarakat dalam mengikuti program kader pemberdayaan masyarakat, antara lain: Masih rendahnya kesadaran sebagian anggota masyarakat, kesibukan masyarakat dan rendahnya tingkat pendidikan masyarakat.

**Kata Kunci:** Partisipasi Masyarakat, Program Kader Pemberdayaan Masyarakat

## I. PENDAHULUAN

Pembangunan pada hakekatnya merupakan suatu rangkaian upaya yang dilakukan secara terus menerus untuk mencapai suatu tingkat kehidupan masyarakat yang sejahtera atau dengan kata lain pembangunan merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh seseorang manusia maupun sekelompok manusia untuk meningkatkan kualitas kehidupannya yang lebih baik, sebagai makhluk berbudaya mempunyai keinginan untuk terus maju dalam kehidupannya baik kemajuan secara pribadi maupun kemajuan itu secara bermasyarakat atau bernegara.

Konsep pembangunan sesungguhnya perlu dihubungkan dengan aspek-aspek sosial, pembangunan sering dirumuskan melalui kebijakan ekonomi dalam banyak hal membuktikan keberhasilan. Kebijakan ekonomi negara umumnya dirumuskan secara konseptual dengan melibatkan pertimbangan dari aspek sosial lingkungan serta didukung mekanisme politik yang bertanggungjawab sehingga setiap kebijakan ekonomi dapat diuraikan kembali secara transparan, adil dan memenuhi kaedah-kaedah perencanaan.

Dalam aspek sosial, bukan saja aspirasi masyarakat ikut dipertimbangkan tetapi juga lembaga-lembaga sosial (*social capital*) juga ikut dipelihara bahkan ditingkatkan fungsinya, sementara aspek lingkungan, aspek fungsi kelestarian lingkungan juga sangat diperhatikan demi kepentingan umat manusia dengan demikian yang terpenting

adalah bagaimana pengambilan keputusan juga berjalan sangat bersih dari beragam perilaku lobi yang bernuansa kekurangan (*moral hazard*) yang dipenuhi kepentingan tertentu, maka hasil pembangunan dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat secara adil melintasi batas ruang dan waktu.

Konsep pembangunan yang dikemukakan di atas sejalan dengan kajian terhadapnya maupun implementasi, berbagai kelemahan muncul seiring ditemukannya fenomena yang khas, antara lain kesenjangan, kemiskinan, pengelolaan publik yang tidak tepat, lemahnya mekanisme kelembagaan dan sistem politik yang kurang berkeadilan untuk itu diperlukan partisipasi masyarakat dalam setiap pembangunan yang dicanangkan oleh pemerintah.

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan sangat diperlukan karena masyarakat merupakan subjek pembangunan yang bertanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya secara mandiri. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan merupakan konsep dari paradigma pemberdayaan masyarakat sesuai dengan pendapat Chambers (dalam Mardikanto dan Soebianto, 2013:25), pemberdayaan masyarakat semakin menjadi kebutuhan dalam setiap upaya pembangunan. Menurut Kartasmita (dalam Mardikanto dan Soebianto 2013:53) pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya itu sendiri, dengan mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya, selanjutnya upaya tersebut diikuti dengan memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat itu sendiri.

Mardikanto dan Soebianto (2013:109), menambahkan bahwa pemberdayaan merupakan implikasi dari strategi pembangunan yang berbasis pada masyarakat (*people centered development*). Sholeh (2014:74), menyatakan bahwa pemberdayaan sebagai sebuah strategi pembangunan harus mampu meningkatkan kapasitas atau keberdayaan yang memungkinkan masyarakat dapat keluar dari belenggu kemiskinan atas dasar kemampuannya sendiri. Menurut Mardikanto dan Soebianto (2013:113), dalam realisasinya pemberdayaan masyarakat sebagian besar berfokus pada pemberdayaan ekonomi dalam rangka pengentasan kemiskinan atau penanggulangan kemiskinan. Pemberdayaan masyarakat selalu dilakukan dalam bentuk pengembangan kegiatan produktif untuk peningkatan pendapatan (*income generating*). Selain itu konsep pemberdayaan masyarakat merupakan model penanggulangan kemiskinan yang melibatkan langsung masyarakat dalam prosesnya tujuan utama dengan dilakukannya pemberdayaan yaitu untuk memberdayakan masyarakatnya agar dapat lebih mandiri dan dapat meningkatkan kemampuannya dalam memperbaiki kualitas kehidupan mereka melalui tindakan mereka sendiri dan untuk diri mereka sendiri.

Dalam rangka penanggulangan kemiskinan dan menindaklanjuti surat Menteri Dalam Negeri Nomor 410/291/18/SJ tanggal 29 Oktober 2004 perihal Program Pemberdayaan Masyarakat dengan transparansi dan akuntabilitas publik, pemerintah pusat tetap akan melanjutkan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM), dengan demikian masyarakat desa terutama kelompok miskin merupakan sasaran program tersebut sekaligus merupakan pelaku utama dan setiap tahapan pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM), mulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan dan pelestarian. Sedangkan pelaku lainnya dari aparat dan konsultan di tingkat desa, Kecamatan dan Kabupaten lebih berperan sebagai fasilitator, pembimbing dan Pembina

agar tujuan, prinsip, kebijakan prosedur dan mekanisme Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) dapat tercapai dan dilaksanakan secara benar konsisten.

Peranan manajemen Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) berhubungan dengan sistem rancangan formal dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat untuk menentukan keefektifitas dan efisiensi dari bakat seseorang untuk mewujudkan sasarannya, manajemen sumber daya manusia disini adalah mencakup perekrutan, pelatihan dan pengembangan. Fokus utamanya adalah memberikan kontribusi pada suksesnya Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) menggambarkan kunci untuk meningkatkan kinerja organisasi adalah dengan memastikan aktivitas untuk mendukung usaha organisasi yang berfokus pada produktivitas, pelayanan dan kualitas. Sebagai kader masyarakat yang peran dan tugasnya membantu pengelolaan pembangunan di desa, diharapkan tidak terikat oleh waktu, maka jumlah Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) di sesuaikan dengan kebutuhan desa dengan mempertimbangkan keterlibatan atau peran serta kaum perempuan, kemampuan teknik, serta kualifikasi pedampingan kelompok ekonomi dan sebagainya.

Kabupaten Lampung Barat Berdasarkan fakta empiris di ketahui bahwa kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan Kader Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Pesawaran masih banyak permasalahan yang di hadapi sehingga berdampak pada kurang optimalnya program pemberdayaan masyarakat khususnya masyarakat yang ada di Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat, hal itu terlihat dari beberapa hal antara lain:

1. Kurangnya sebagian partisipasi masyarakat Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat dalam proses pembangunan pekon hal itu disebabkan dari informasi dan sosialisasi yang dilakukan oleh Kader Pemberdayaan Masyarakat kurang tepat sasaran dan tidak efektif hal itu dilihat dari Kader Pemberdayaan Masyarakat hanya menggunakan papan informasi yang ada di sekretariat dalam memberikan informasi dan spanduk yang di pasang di beberapa tempat di mana masyarakat kurang merespon informasi yang disampaikan oleh Kader Pemberdayaan Masyarakat
2. Rendahnya penyerapan dana pekon di mana pemerintah pusat sudah menggulirkan dana pekon sebesar Rp. 115 Milyar/Pekon di tahun 2016 yang bersumber dari APBN dan Alokasi Dana Desa (ADD), besarnya dana yang diterima seharusnya bisa di dimanfaatkan oleh aparatur pekon yang di bantu oleh Kader Pemberdayaan Masyarakat dalam melakukan penyusunan perencanaan pemberdayaan agar dana pekon yang sudah di gulirkan dapat di serap dengan maksimal tetapi fakta di lapangan dana pekon tidak mampu di serap dengan baik hal itu terlihat dari masih banyak pekon di Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat yang tidak mampu mengembangkan ekonomi kreatif dengan memanfaatkan sumber daya alam yang melimpah serta banyak infrastruktur sarana dan prasaran pekon yang masih jauh dari kata layak hal tersebut yang membuat rendahnya penyerapan anggaran pekon di Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat
3. Kurang terakomodirnya usulan kegiatan berbasis pemberdayaan masyarakat, hal itu terlihat dari minimnya kegiatan pelatihan untuk meningkatkan ekonomi kreatif masyarakat di mana selama ini masyarakat di beberapa Pekon di Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat hanya mampu menjalankan kegiatan pemberdayaan ekowisata selebihnya belum ada tindak lanjut misalnya kegiatan kerajinan dan pengembangan industri rumahan di mana kegiatan-kegiatan tersebut

mampu meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat selama ini kegiatan kerajinan yang dijalankan adalah pembuatan tapis sedangkan industri rumahan hanya melakukan pengelolaan produksi kopi pada hal masih banyak potensi-potensi ekonomi kreatif yang mampu di kembangkan menginging Lampung Barat merupakan salah satu destinasi wisata yang banyak di kungjungi oleh wisatawan

4. Kurang terakomodirnya usulan kelompok perempuan, masyarakat miskin dan difabel dalam pembangunan pekon hal itu terlihat dari tidak ada kegiatan pemberdayaan khusus yang di canangkan oleh Kader Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat misalnya kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) di mana program ini memberikan kesempatan kepada kaum perempuan untuk mengembangkan ekonomi kreatif mulai dari kegiatan kerajinan sampai dengan pengembangan industri rumahan serta program peduli untuk kalangan masyarakat miskin dan difabel di mana program peduli dirancang untuk mendorong inklusi sosial bagi kaum marjinal agar meningkatkan akses pelayanan publik, memberikan kesempatan kerja, dan mendorong partisipasi masyarakat yang lebih luas.

Masih banyaknya permasalahan program pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat yang dilaksanakan oleh Kader Pemberdayaan Masyarakat maka pemerintah daerah Kabupaten Lampung Barat harus segera melakukan evaluasi secara komprehensif, sistematis dan masif untuk menyelesaikan atau mencari solusi kongrit dalam rangka mengatasi permasalahan tersebut dengan tujuan agar program-program pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh Kader Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat dapat betul-betul optimal dan tepat sasaran sehingga masyarakat pekon mulai dari kualitas sampai dengan kesejahteraan masyarakat dapat meningkat serta menurunnya angka kemiskinan di Kabupaten Lampung Barat khususnya di Kecamatan Balik Bukit.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

Secara umum partisipasi menurut Wahyuni (dalam Pratiwi, 2008:7) mempunyai arti keterlibatan seseorang secara aktif dalam suatu kegiatan, sedangkan Hubeis (dalam Pratiwi (2008:11), mendefinisikan partisipasi sebagai keikutsertaan masyarakat dalam pernyataan maupun kegiatan, sedangkan menurut Kumar dalam Wicaksono (2010:27), partisipasi masyarakat adalah *a voluntary contribution to national development, but the people are not expected to take part in shaping the programme or in the criticising its contents.*

Menurut Uphoff, Cohen, dan Goldsmith (2009:21), mendefinisikan partisipasi sebagai keterlibatan aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan tentang apa yang akan dilakukan dan bagaimana cara kerjanya, keterlibatan masyarakat dalam keterlibatan program dan pengambilan keputusan yang telah ditetapkan melalui sumbangan sumber daya atau bekerja sama dalam suatu organisasi, keterlibatan masyarakat menikmati hasil dari pembangunan, serta dalam evaluasi pada pelaksanaan program.

Menurut Uphoff, Cohen, dan Goldsmith (2009:24), membagi partisipasi ke dalam beberapa jenis tahapan, yaitu:

1. Tahap perencanaan, ditandai dengan keterlibatan masyarakat dalam kegiatankegiatan yang merencanakan program pembangunan yang akan dilaksanakan di desa, serta menyusun rencana kerjanya
2. Tahap pelaksanaan, yang merupakan tahap terpenting dalam pembangunan, sebab inti dari pembangunan adalah pelaksanaannya. Wujud nyata partisipasi pada tahap ini dapat digolongkan menjadi tiga, yaitu partisipasi dalam bentuk sumbangan pemikiran, bentuk sumbangan materi, dan bentuk keterlibatan sebagai anggota proyek
3. Tahap menikmati hasil, yang dapat dijadikan indikator keberhasilan partisipasi masyarakat pada tahap perencanaan dan pelaksanaan proyek. Selain itu, dengan melihat posisi masyarakat sebagai subjek pembangunan, maka semakin besar manfaat proyek dirasakan, berarti proyek tersebut berhasil mengenai sasaran/

Pemberdayaan masyarakat biasa dipahami atau diartikan sebagai proses mengembangkan, memandirikan, menswadayakan, memperkuat posisi tawar menawar masyarakat lapisan bawah terhadap kekuatan-kekuatan penekan di segala bidang dan sektor kehidupan. ada pula pihak lain yang menegaskan bahwa pemberdayaan adalah proses memfasilitasi warga masyarakat secara bersama-sama pada sebuah kepentingan bersama atau urusan yang secara kolektif dapat mengidentifikasi sasaran, mengumpulkan sumber daya, mengerahkan suatu kampanye aksi dan oleh karena itu membantu menyusun kembali kekuatan dalam komunitas.

Hal ini juga dikuatkan oleh pendapat Sumodingrat (2009:7), yang mengemukakan bahwa masyarakat adalah makhluk hidup yang memiliki relasi sosial maupun ekonomi, maka pemberdayaan sosial merupakan suatu upaya untuk membangun semangat hidup secara mandiri dikalangan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup masing-masing secara bersama-sama. Menurut Ife (2008:56), mengungkapkan bahwa pemberdayaan ditujukan untuk meningkatkan kekuasaan (*power*) dari kelompok masyarakat yang kurang beruntung (*disadvantaged*).

Menurut Payne dalam Adi (2013:54), mengemukakan bahwa proses pemberdayaan pada intinya ditujukan guna membantu klien memperoleh daya untuk mengambil keputusan dan menentukan tindakan yang akan dia lakukan yang terkait dengan diri mereka, termasuk mengurangi efek hambatan pribadi dan sosial dalam melakukan tindakan. Hal ini dilakukan melalui peningkatan kemampuan dan rasa percaya diri untuk menggunakan daya yang dia miliki, antara lain melalui transfer daya dari lingkungannya.

Berdasarkan definisi-definisi tersebut di atas, pemberdayaan masyarakat adalah suatu proses untuk meningkatkan kemampuan atau kapasitas masyarakat dalam memanfaatkan sumber daya yang dimiliki, baik itu sumber daya manusia (SDM) maupun sumber daya alam (SDA) yang tersedia dilingkungannya agar dapat meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Namun upaya yang dilakukan tidak hanya sebatas untuk meningkatkan kemampuan atau kapasitas dari masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, tetapi juga untuk membangun jiwa kemandirian masyarakat agar berkembang dan mempunyai motivasi yang kuat dalam berpartisipasi dalam proses pemberdayaan masyarakat dalam hal ini menjadi pelaku atau pusat proses pemberdayaan.

Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPM) merupakan sebuah proses kerja dari tim kader pemberdayaan masyarakat desa, sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Sedangkan pengertian dari KPM sendiri adalah sebuah tim yang dibentuk oleh masyarakat melalui musyawarah desa dengan menunjuk satu orang laki-laki dan satu orang perempuan sebagai anggotanya. KPM bertugas sebagai pendamping masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pemeliharaan/pelestarian dalam sebuah kegiatan pembangunan, (Tim Pengendali PNPM Tahun 2010).

Menurut Hutomo (2010:81), KPM adalah warga desa terpilih yang memfasilitasi atau memandu masyarakat dalam mengikuti atau melaksanakan tahapan PNPM Mandiri Perdesaan di desa dan kelompok masyarakat pada tahap perencanaan, pelaksanaan, maupun pemeliharaan/pelestarian. Sebagai kader masyarakat, peran dan tugasnya dalam membantu pengelolaan pembangunan, diharapkan dapat menarik simpati dari masyarakat, bekerja sama dengan baik, serta memberikan pelayanan dengan baik agar masyarakat dapat berpartisipasi secara aktif sehingga pembangunan yang akan dilaksanakan dapat mengenai sasaran dengan tepat dan optimal.

Menurut Tim PNPM-PPK Kecamatan (2011:15-7), KPM sebagai agen pemberdayaan dituntut agar memiliki jiwa sosial yang tinggi sebagai kader pemberdayaan masyarakat harus dapat melayani masyarakat kapanpun dan dimanapun dengan sepenuh hati, mampu mengarahkan serta membimbing masyarakat dalam proses pembangunan, memiliki sikap jujur serta kesukarelaan yang tinggi dalam menjalankan tugasnya. Sebagai kader pemberdayaan masyarakat yang berhubungan langsung dengan masyarakat, KPM harus mampu mendorong serta menciptakan masyarakat yang mampu melakukan perubahan dalam dirinya sendiri sehingga menjadi pribadi yang lebih mandiri dan berdaya saing. Perubahan ini menyangkut pada aspek pengetahuan, sikap, maupun keterampilan yang berguna untuk meningkatkan kualitas kehidupan. Sebagaimana terkandung dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Desa yang menjelaskan bahwa pemberdayaan masyarakat desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.

Pemberdayaan sebenarnya tidak hanya dapat dilakukan dalam pengentasan kemiskinan saja, namun pemberdayaan seringkali diterapkan untuk menangani masalah kemiskinan. Kegiatan pemberdayaan dinilai sebagai solusi yang tepat dalam penuntasan kemiskinan, karena melalui pemberdayaan, masyarakat tidak hanya mendapatkan peningkatan pendapatannya semata, akan tetapi melalui program pemberdayaan ini masyarakat dapat memperoleh pendidikan, pengalaman, pembinaan serta aspek lain yang dapat meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat.

### **III. METODE PENELITIAN**

Desain yang digunakan dalam penelitian ini adalah desain penelitian kualitatif, menurut Sugiyono (2013:9), metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berdasarkan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek

yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan datanya dilakukan dengan cara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

Teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data antara lain dengan cara:

1. Observasi  
Merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan jalan mengamati terhadap fenomena yang diteliti, melalui teknik ini diharapkan akan mendapatkan gambaran yang lebih lengkap dan menyeluruh mengenai obyek yang diamati, karena peneliti dalam hal ini akan mengadakan pengamatan langsung.
2. Wawancara  
Wawancara (*interview*) adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.
3. Dokumentasi  
Merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan menelaah dokumen, arsip, maupun referensi yang mempunyai relevansi dengan tema penelitian dalam aplikasinya selama proses penelitian

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis model interaktif (*interactive model of analysis*) yang dikembangkan oleh Miles and Huberman, yang terdiri dari tiga komponen analisis berupa::

1. Reduksi data (*reduction data*)  
Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok memfokuskan pada hal-hal yang penting serta dicari tema dan polanya, Sehingga dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.
2. Penyajian data (*data display*)  
Setelah direduksi data maka langkah selajutnya adalah mendisplay data, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dengan mendisplay data akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang dipahami.
3. Verifikasi (*conclusion drawing*)  
Langkah ketiga adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi, kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah jika tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya tetapi apabila kesimpulan awal ditemukan ditemukan bukti-bukti yang valid dan konsistem saat penelitian kembali ke lapangan mengumpulkan data maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. Sehingga dengan demikian kesimpulan dalam penelitian ini akan menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal.

#### **IV. HASIL DAN PEMBAHASAN**

##### **Hasil Penelitian**

## **1. Partisipasi Masyarakat dalam Mengikuti Perencanaan Program Kader Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat**

Hasil observasi penelitian menunjukkan bahwa keaktifan masyarakat berpartisipasi dalam bentuk perencanaan program seperti mengikuti rapat, menyampaikan gagasan-gagasan terhadap kelangsungan program pemberdayaan di Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat dapat dikatakan cukup tinggi dimana hal itu terlihat dari masyarakat sangat antusias mendukung mengikuti rapat ataupun pertemuan-pertemuan selain itu masyarakat juga selalu memberikan usulan dalam merencanakan program yang akan dilaksanakan selain itu juga masyarakat juga memberikan kritik dan masukan dimi mengoptimalkan program pemberdayaan masyarakat mulai dari program pembangunan sarana dan prasarana pekon/desa sampai dengan program peningkatan keterampilan masyarakat. Aktifnya masyarakat dalam sebuah perencanaan program yang akan dilaksanakan tidak lepas dari adanya sinergisitas yang baik antara masyarakat dengan Unit Pemberdayaan Masyarakat (UPK). Selain itu, salah satu prinsip Unit Pemberdayaan Masyarakat (UPK) yang menghendaki adanya transparansi dan demokrasi, sehingga peran dan peluang masyarakat dalam berbagai aspek menjadi sangat besar khususnya dalam perencanaan program.

Hasil Wawancara maka dapat di ketahui bahwa partisipasi masyarakat dalam perencanaan program kader pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat sudah sangat baik masyarakat sangat aktif dalam berbagai perencanaan program mulai dari program percepatan pembangunan pekon di mana masyarakat memberikan masukan dan dan ide-ide kreatif dalam pembangunan sarana dan prasarana pekon khususnya dalam pembuatan BAK penampung air irigasi, pembuatan irigasi dan perbaikan jalan serta sarana umum, program Simpan Pinjam Perempuan (SPP) di mana masyarakat memberikan usulan tentang optimalisasi pendampingan bagi masyarakat yang sudah mendapatkan bantuan modal usaha sehingga masyarakat penerima bantuan modal usaha tersebut betul-betul tepat sasaran dan di gunakan sesuai program pemberdayaan masyarakat yaitu meningkatkan kualitas perekonomian masyarakat pekon dengan dan program pendampingan pemanfaatan hasil di mana masyarakat di haruskan untuk menggunakan sarana dan prasarana serta fasilitas yang sudah di buat oleh Kader Pemberdayaan Masyarakat sehingga program-program yang di buat terus berjalan dan bermanfaat untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat pekon.

## **2. Partisipasi Masyarakat dalam Mengikuti Pelaksanaan Program Kader Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat**

### **a. Partisipasi masyarakat dalam bentuk tenaga**

Hasil penelitian di ketahui bahwa partisipasi masyarakat dalam bentuk tenaga terhadap pelaksanaan pembangunan program pemberdayaan di wilayah Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat dapat diketahui dalam dua bentuk yaitu *Pertama*, partisipasi sebagai buruh harian, masyarakat dalam hal ini bertindak sebagai buruh (tenaga kerja), yang mana atas jasa ini masyarakat digajih sesuai dengan harian orang kerja (HOK). Dalam kesempatan ini tenaga kerja yang diprioritaskan adalah masyarakat internal atau masyarakat penerima program.

Keterlibatan masyarakat sebagai buruh harian dalam program pemberdayaan tidak seperti buruh-buruh pada umumnya, yakni masyarakat digajih sesuai dengan pasaran yang berlaku. Namun dalam hal ini masyarakat akan digajih setengah dari pasaran buruh pada umumnya dan sebagian partisipasi tersebut adalah bentuk swadaya masyarakat.

- b. Partisipasi masyarakat dalam bentuk tanah dan tanaman  
Berdasarkan informasi hasil penelitian maka dapat di ketahui bahwa rata-rata masyarakat di wilayah Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat tidak merasa keberatan dengan di gunakannya lahan masyarakat sebagai area pembangunan program-program pemberdayaan yang dilaksanakan oleh kader pemberdayaan masyarakat, hal itu membuktikan bahwa partisipasi masyarakat di wilayah Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat cukup tinggi masyarakat rela menghibahkan lahan dan tanamannya untuk digunakan sebagai pembangunan atau pengembangan program pemberdayaan masyarakat demi kesejahteraan dan kemajuan sebuah desa yang mereka tempati
- c. Partisipasi masyarakat dalam Program Simpan Pinjam Perempuan (SPP)  
Berdasarkan informasi penelitian maka dapat di ketahui program Simpan Pinjam Perempuan (SPP) sangat membantu pengembangan atau peningkatan perekonomian masyarakat desa khususnya kaum perempuan, dengan adanya dana bergulir seperti Simpan Pinjam Perempuan (SPP) membuat adanya peningkatan kesejahteraan masyarakat, hal tersebut yang membuat rata-rata masyarakat di wilayah Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat mendukung dan aktif dalam berbagai kegiatan pemberdayaan yang akan dilaksanakan oleh Kader Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat.

### **3. Partisipasi Masyarakat dalam Pemanfaatan Hasil Program Kader Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat**

Hasil observasi di lapangan menunjukkan bahwa masyarakat di wilayah Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat sudah memanfaatkan hasil program yang di buat oleh kader pemberdayaan masyarakat, hal itu terlihat dari masyarakat memanfaatkan bantuan modal usaha atau bantuan khusus perempuan yaitu Simpan Pinjam Perempuan (SPP), di mana dana bantuan tersebut di gunakan untuk mengembangkan usaha mulai dari membuka warung sampai dengan usaha budidaya perikanan dan perkebunan, selain pemanfaatan bantuan dana masyarakat juga memanfaatkan BAK penampungan air irigasi serta penggunaan sarana dan prasaran untuk pengolahan produksi hasil panen yang dibuat oleh kader pemberdayaan. Adanya pemanfaatan hasil program dari kader pemberdayaan masyarakat Kecamatan Balik Bukit Lampung Barat membuktikan partisipasi masyarakat sangat baik, masyarakat tidak mau menyia-nyaiakan program dan sarana serta prasaran yang sudah di buat oleh kader pemberdayaan masyarakat Kecamatan Balik Bukit Lampung Barat.

## **Pembahasan**

Program pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu mekanisme program untuk memberikan kesejahteraan bagi masyarakat dan percepatan pembangunan di daerah yang digunakan oleh Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM) selain itu program pemberdayaan masyarakat merupakan upaya mempercepat penanggulangan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja di wilayah perdesaan. Dalam kegiatan pemberdayaan yang dilakukan oleh Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM) seluruh anggota masyarakat diajak terlibat dalam setiap tahapan kegiatan secara partisipatif, mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan program dalam penggunaan dan pengelolaan dana sesuai kebutuhan paling prioritas di desanya, sampai pada kegiatan pemanfaatan hasil program.

Berdasarkan prinsip Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM) program ini mengedepankan partisipasi sebagai landasan dasar pelaksanaannya, sehingga operasionalnya program ini mengacu pada prinsip *participatory rural appraisal (PRA)*. Dimana kunci kesuksesan berada ditangan masyarakat sebagai subjek maupun objek pembangunan (Chambers, 2012:7). Banyak dampak positif yang dirasakan masyarakat desa khususnya desa di Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat sebagai salah satu kecamatan yang sangat antusias mendukung sekaligus kecamatan yang melaksanakan program ini secara komprehensif dan masif. Program ini melihat setiap permasalahan dari cara pandang masyarakat sesuai dengan kondisi yang dialami, secara tidak langsung masyarakat dipacu dan dimobilisasi agar mampu melihat, memiliki kesadaran dan kemandirian terhadap kondisi kehidupan yang mereka alami.

Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat merupakan salah satu Kecamatan yang cukup aktif sehingga menjadi kecamatan percoohan dalam semua kegiatan pemberdayaan masyarakat yang difasilitasi oleh Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM) sehingga selalu memperoleh bantuan dalam melaksanakan program pemberdayaan masyarakat. Sejak digulirkannya program pemberdayaan masyarakat Kecamatan Balik Bukit telah melaksanakan delapan program pembangunan fisik dengan intensitas 1 sampai dengan 2 pelaksanaan program pembangunan dalam setiap tahunnya ditambah 1 program perguliran, sebagai bentuk partisipasi kaum perempuan, program ini dikenal dengan program Simpan Pinjam Perempuan (SPP).

Berbagai bukti pembangunan tersebut, mengindikasikan bahwa respon dan antusias masyarakat Kecamatan Balik Bukit dalam mendukung program ini sangat tinggi, berbeda dengan program lainnya yang kurang mendapatkan apresiasi. Keterlibatan masyarakat sebagai subjek pembangunan dalam program ini sangat nampak mulai dari perencanaan, dimana masyarakat merupakan sentral dari pada ide dan gagasan pembangunan, setiap ide pembangunan digali atau berasal dari orientasi dan pengamatan masyarakat terhadap kendala dan permasalahan yang mereka hadapi. Selain itu, aspek yang paling penting dan sangat menentukan yaitu dalam pelaksanaan pembangunan, usulan perencanaan pembangunan merupakan seleksi dari sekian banyaknya permasalahan yang dihadapi sesuai dengan prioritas dan mendesaknya persoalan tersebut. Sedangkan dalam pelaksanaan program, apapun bentuk program tersebut semuanya adalah aspirasi masyarakat oleh karena itu masyarakat adalah memiliki sekaligus bertanggung jawab terhadap keberhasilan pelaksanaan program tersebut. Selain pada tahap perencanaan dan pelaksanaan, bentuk nyata partisipasi

masyarakat juga terlihat pada tahap pemeliharaan atau pelestarian hasil pembangunan. Setelah adanya serah terima, pemerintah tidak lagi bertanggung jawab terhadap pemeliharaan hasil program, melainkan diserahkan kepada masyarakat sebagai pemiliknya serta melakukan kegiatan penampungan kepada semua masyarakat dengan tujuan program dapat berjalan dengan tepat. Meskipun demikian, ini menjadi sentral bagi tim evaluasi dalam menentukan nasib kelanjutan program yang di gagas oleh kader pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan keterangan dan hasil penelitian yang diperoleh, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program pemberdayaan oleh kader pemberdayaan masyarakat sangat ditentukan oleh kesadaran, kepedulian dan kemandirian masyarakat semakin tinggi kepedulian, kesadaran dan kemandirian masyarakat maka semakin baik pula hasil pembangunan yang akan dihasilkan. Selain itu, program pemberdayaan oleh kader pemberdayaan masyarakat sifatnya berkelanjutan, program ini tidak selesai seiring rampungnya pelaksanaan pembangunan. Melainkan program yang dilaksanakan dapat memberikan dampak positif yang berkelanjutan sehingga tidak hanya dapat memberikan kesejahteraan pada saat program dilaksanakan, akan tetapi dapat bermanfaat kedepannya bagi generasi yang akan datang.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa manfaat yang dirasakan masyarakat Kecamatan Balik Bukit dengan adanya program yang dilaksanakan oleh kader pemberdayaan masyarakat sangat besar dan nyata, terutama terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai sasaran utamanya. Aktifitas masyarakat menjadi lebih produktif, lahan yang dulunya tidak diolah sudah mulai difungsikan dengan adanya sarana jalan yang memadai, waktu beraktifitas menjadi lebih padat, distribusi hasil pertanian menjadi lebih lancar, semangat kerja masyarakat semakin tinggi dan banyak manfaat lainnya.

## **V. KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

1. Partisipasi masyarakat dalam mengikuti program kader pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat, secara keseluruhan sudah cukup baik, hal itu terlihat dari beberapa hal antara lain:
  - a. Partisipasi masyarakat dalam perencanaan program  
Partisipasi masyarakat dalam perencanaan program kader pemberdayaan masyarakat sudah sangat baik masyarakat sangat aktif dalam berbagai perencanaan program percepatan pembangunan pekon, program Simpan Pinjam Perempuan (SPP) dan program pendampingan pemanfaatan hasil.
  - b. Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program  
Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program pemberdayaan sangat baik, hal terlihat dari adanya partisipasi masyarakat dalam bentuk tenaga, adanya hibah dari masyarakat dalam bentuk tanah dan tanaman untuk mengoptimalkan pembangunan proyek pemberdayaan masyarakat dan pelaksanaan Program Simpan Pinjam Perempuan (SPP) yang dibuktikan dari tertibnya masyarakat mengembalikan dana Simpan Pinjam Perempuan (SPP).
  - c. Partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan hasil program  
Masyarakat sudah memanfaatkan hasil dari program yang di buat oleh Kader Pemberdayaan Masyarakat di mana masyarakat memanfaatkan atau menggunakan fasilitas pemberdayaan yang dibuat oleh Kader Pemberdayaan Masyarakat mulai

dari fasilitas fisik maupun non fisik semua di gunakan dan di rawat secara bersama-sama.

2. Aspek-aspek penghambat partisipasi masyarakat dalam mengikuti program kader pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat, antara lain:
  - a. Masih rendahnya kesadaran sebagian anggota masyarakat
  - b. Kesibukan masyarakat
  - c. Rendahnya tingkat pendidikan masyarakat.

### **Saran**

1. Program pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh kadert pemberdayaan masyarakat perlu lebih ditingkatkan dalam berbagai kegiatan pembangunan agar dapat lebih mandiri dalam pelaksanaan pembangunan, terutama melakukan pembinaan terhadap organisasi-organisasi kemasyarakatan agar menjadi motivator dan pelopor dalam pelaksanaan pembangunan, sehingga mampu untuk merencanakan sendiri kegiatan/program pembangunannya agar peran pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan dapat dikurangi
2. Perlu adanya penambahan/peningkatan dana yang lebih besar dari yang ada sekarang dan lebih difokuskan pada kegiatan usaha ekonomi masyarakat, sehingga mampu pemberdayaan masyarakat terutama masyarakat miskin untuk dapat meningkatkan kesejahteraan hidup mereka atau perlu mengembangkan model baru dalam pendekatan pembangunan untuk meningkatkan keswadayaan masyarakat agar lebih mandiri dalam melaksanakan pembangunan dan tidak selalu bergantung pada program yang diberikan oleh pemerintah.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Adi, Isbandi Rukminto. 2013. *Intervensi Komunitas Pengembangan Masyarakat Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: PT. Radja Grafindo Persada
- Abdul Syani. 2007. *Sosiologi dan Perubahan Masyarakat*. Bandar Lampung: Pustaka Jaya Unila Bandar Lampung
- Ariyani I. 2007. *Penguatan Partisipasi Masyarakat dalam Program Imbal Swadaya Di Desa Curug Kecamatan Gunung Sindur Kabupaten Bogor*. Bogor: Sekolah Pascasarjana, IPB.
- Anonim. 2008. *Pengertian Persepsi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Creswell, Jhon W. 2016. *Research Design : Qualitativ and Quantitative Approach*. California. Sage Publication.
- Eko, Sutoro. 2014. *Desa Membangun Indonesia*. Yogyakarta: Forum Pengembangan Pembaharuan Desa (FPPD) dan ACCESS.
- Firmansyah S. 2009. *Partisipasi Masyarakat*. Jakarta: PT. Raja Grafindo
- Hutomo. 2010. *Pelatihan Kader PNPM Mandiri Perdesaan*. Kudus.

- Ife, Jim dan Frank Tesoriero. 2008. *Community Development : Alternatif Pengembangan Masyarakat di era Globalisasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Jones, Charles. 2016. *Pengantar Kebijakan Publik*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Mardikanto, Totok dan Poerwoko Soebiato. 2013. *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Bandung : Alfabeta.
- Makmur S. 2005. *Partisipasi Masyarakat dalam Program Pengembangan Prasarana Perdesaan (P2D) (Kasus : Desa Lok Gabang, Kecamatan Astambul, Kabupaten Banjar, Propinsi Kalimantan Selatan)*. Bogor: Departemen Ilmu-Ilmu Sosial Ekonomi Pertanian, IPB.
- Mulyana, Deddy. 2013. *Metodologi Penelitian Kualitatif, Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Moeljarto, Tjokroaminoto. 2009. *Politik Pembangunan Sebuah Analisis, Konsep Arah dan Strategi*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Moleong, Lexy J. 2013. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Karya.
- Nugroho, Iwan. 2011. *Ekowisata dan Pembangunan Berkelanjutan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Pambudi, Himawan (ed). 2013. *Jalan Baru Keadilan Dokumen Pertemuan Konsolidasi Pembaruan Desa (Bandung-Yogyakarta-Garut)*, Yogyakarta: Lappera Pustaka Utama.
- Pratiwi AT. 2008. *Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Radio Komunitas (Kasus: Radio Komunitas Suara Kencana, Kecamatan Tanah Sareal, KotaBogor)*. Bogor:SKPM, FEMA, IPB.
- Setiadi, Elly M. dkk. 2012. *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar*. Jakarta: kencana.
- Sholeh, Maimun. 2014. *Kemiskinan: Telaah dan Beberapa Strategi Penanggulangannya*. Malang: Intimedia.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta.
- Sulistiyani, AT. 2014. *Kemitraan dan Mode-Model Pemberdayaan*, Yogyakarta: Gava Media.
- Sumodiningrat, G. 2009. *Pemberdayaan masyarakat dan Jaringan Pengamanan Sosial*, Yogyakarta: IDEA.

Sumarwan U. 2014. *Perilaku Konsumen*. Cetakan ke-2. Bogor: Ghalia Indonesia.

Tim Pengendali PNPM. 2010. *Pedoman Umum PNPM Mandiri*. Jakarta.

Tim PNPM-PPK Kecamatan. 2011. *Pelatihan Kader PNPM Mandiri Perdesaan*. Jakarta.